



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G / 342 / III.18 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA
SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pemberian pelayanan dan penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang dilaksanakan pada Kantor Bersama Samsat Provinsi Lampung dapat lebih ditingkatkan, perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan terhadap aparatur yang bertugas pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : 1. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : Ins/ 03/ M/ X/ 1999, Nomor : 29 Tahun 1999 dan Nomor : 6/ IMK.014/ 1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

2. Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/ 06 / X / 1999, Nomor : 973 / 1228 dan Nomor : Skep / 02/ X / 1999 tanggal 15 Oktober 1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kasatu mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT);
 - b. melaksanakan pembinaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT);
 - c. memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT);
 - d. melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT);

- e. menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) secara berkala dengan tembusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Provinsi Lampung;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) secara berkala kepada Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Pusat.
- g. melakukan upaya – upaya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap;
- h. melakukan pembinaan kepada para aparat pelaksana pemungutan pajak dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim Pembina Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang mempunyai tugas sebagaimana berikut :
- a. melaksanakan tugas-tugas Kesekretariatan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas sebagaimana Diktum Kedua.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi Lampung, Kode Rekening : 5.2.1.01.01.
- KEENAM** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA. PROVINSI	<i>h</i>
2. ASS. BID. PEM.	<i>h</i>
3. ASS. BID. EKUBANG	<i>h</i>
4. ASS. BID. KESRA	
5. ASS. BID. UMUM	
6.	
7. DI PENDA	<i>h</i>
8.	
9. BIRO HUKUM	<i>h</i>

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 April 2009
GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri, u.p., Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Kapolda Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 342 /III.18/HK/2009
TANGGAL : 17 - 4 - April 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

No	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1	Gubernur Lampung	Pengarah	Rp. 250.000,-	Diberikan Honorarium Tim terhitung sejak
2	Kapolda Lampung	Pengarah	Rp. 250.000,-	Bulan Januari 2009 sampai dengan
3	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua Umum	Rp. 200.000,-	Desember 2009 dibebankan pada APBD
4	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Ketua Pelaksana Harian	Rp. 200.000,-	Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009,
5	Dir. Lalulintas Polda Lampung	Ketua Pelaksana Harian	Rp. 200.000,-	pada DPA-SKPD Provinsi Lampung, Kode
6	Ka. PT. Jasa Raharia Cabang Lampung	Ketua Pelaksana Harian	Rp. 200.000,-	Rekening : 5.2.1.01.01.
7	Kabid Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 175.000,-	
8	Ka. Subdit Reg. Ident. Dit. Lantas Polda Lampung	Wakil Sekretaris	Rp. 175.000,-	
9	Karo Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
10	Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
11	Karo Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
12	Kabid Bipram Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
13	Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
14	Kabag Operasional PT. Jasa Raharia (Persero)	Anggota	Rp. 150.000,-	
15	Kabid Binwas Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
16	Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
17	Kasubid Pembukuan & Pelaporan Dipenda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
18	Kasubid Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
19	Kasubid Doleansi & Sengketa Pajak Dipenda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
20	Kasubid Kumdang Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
21	Kasubag UU 33/34 PT. Jasa Raharia Cabang Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
22	Kasi STNK Dit. Lantas Polda Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
23	Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

PARAF KORDINASI	
1. SEKDA PROPINSI	<i>[Signature]</i>
2. ASS. SID. PEM.	<i>[Signature]</i>
3. ASS. BID. EKUBANG	<i>[Signature]</i>
4. ASS. BID. KESRA	<i>[Signature]</i>
5. ASS. BID. UMUM	<i>[Signature]</i>
6.	<i>[Signature]</i>
7. DIAPENDA	<i>[Signature]</i>
8.	<i>[Signature]</i>
9. BIRO HUKUM	<i>[Signature]</i>

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : GI/3/2 /III.18/HK/2009
 TANGGAL : 17 - April 2009

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
 KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2009

No	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1.	Drs. RAMILAN, MM	Staf Sekretariat	Rp. 125.000,-	Diberikan Honorarium Tim terhitung sejak Bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, pada DPA-SKPD Provinsi Lampung, Kode Rekening : 5.2.1.01.01.
2.	Drs. DESMANSYAH	Staf Sekretariat	Rp. 125.000,-	
3.	Drs. EMRIN RIADY	Staf Sekretariat	Rp. 125.000,-	
4.	SUHAIMI, S.Sos	Staf Sekretariat	Rp. 125.000,-	
5.	DHARMA SETIAWAN, SH	Staf Sekretariat	Rp. 125.000,-	
6.	EKALIA YUNIZA, SE	Staf Sekretariat	Rp. 125.000,-	
7.	MAULANA, S.Sos.MM	Staf Sekretariat	Rp. 125.000,-	
8.	MAEVA FEBRIANA, SH.MM	Staf Sekretariat	Rp. 125.000,-	
9.	YUREKA, S.Sos	Staf Sekretariat	Rp. 125.000,-	
10.	ARIEF RAKHMAN JACOEB, SE.MM	Staf Sekretariat	Rp. 125.000,-	
11.	DAYAN	Staf Sekretariat	Rp. 125.000,-	
12.	ANDARSYAH, S.Sos	Staf Sekretariat	Rp. 125.000,-	
13.	IPTUR	Staf Sekretariat	Rp. 125.000,-	
14.	SYAIFULLAH ALAMUDIN, SE	Staf Sekretariat	Rp. 125.000,-	
15.	IDHI SUSSWANDI	Staf Sekretariat	Rp. 125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU

PAPUA NEW GUINEA	
1. SEKDA. PROPINSI	
2. ASS. BID. PEM.	
3. ASS. BID. EKUBANG	
4. ASS. BID. KESRA	
5. ASS. BID. UMLA	
6.	
7. DIREKSI	

BERO MELAKA